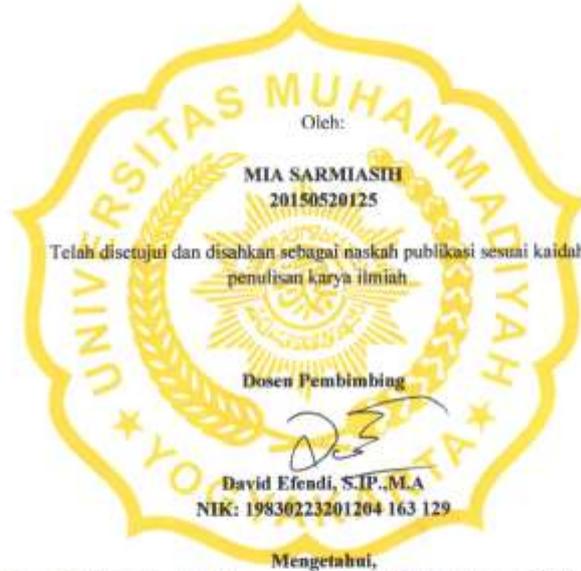


NASKAH PUBLIKASI

**POLITIK KESEJAHTERAAN BERBASIS FILANTROPI PASCA
REFORMASI DI INDONESIA (Studi Kasus: Pos Keadilan Peduli Umat
(PKPU) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta)**



POLITIK KESEJAHTERAAN BERBASIS FILANTROPI PASCA REFORMASI DI INDONESIA

Mia Sarmiasih

Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail: miasarmiasih96@gmail.com

Abstract

Kehadiran lembaga PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) yang dilahirkan atas inisiasi gerakan politik PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mampu menjadi lembaga filantropi yang memiliki agenda program kerja jangka panjang berbasis pemberdayaan masyarakat serta dapat bersinergi dengan agenda pembangunan secara global melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kemudian, berkembangnya lembaga filantropi baik yang berbasis negara maupun masyarakat sipil seperti halnya PKPU di era kontemporer telah menunjukkan terjadinya politik kesejahteraan yang dikontestasikan oleh beberapa kalangan penyelenggara jaminan kesejahteraan diantaranya lembaga filantropi, partai politik, LSM, media massa, korporasi atau CSR. Maka, hal ini membuktikan semakin kuatnya kesejahteraan menjadi barang politik (*political goods*) sehingga, semua pihak ingin menaruh komitmen atas kerja-kerja kemanusiaan, meskipun arah gerakannya melakukan afiliasi.

Dalam penelitian studi kasus (*case study*) ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif interpretatif. Dimana metode ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan informasi politik kesejahteraan berbasis lembaga filantropi yang terdapat pada PKPU cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dan ingin mengetahui patronase politik dibalik aktivitas pelayanan distribusi kesejahteraan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh temuan bahwa politik kesejahteraan berbasis filantropi pasca reformasi di Indonesia yaitu *pertama* terjadinya kontestasi politik kesejahteraan yang dibangun dengan kekuatan modal sosial dan praktik demokrasi sosial mampu membuat agenda kesejahteraan sosial, dibuktikan dengan peran PKPU mampu menjamin pelayanan distribusi kesejahteraan disaat negara mengalami kapasitas lemah di dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial, *kedua* hadirnya pelembagaan PKPU yang notabene berangkat dari hasil inisiatif kader PKS dapat berguna untuk beberapa fungsi diantaranya fungsi pembangunan kesejahteraan, konsolidasi politik ideologis, dan adanya potensi besar dalam menyumbang atau berkontribusi pada dukungan proses elektoral. Kehadiran PKPU dipercaya oleh PKS merupakan agensi kolektif non pemerintah yang terlembagakan secara sistematis sebagai alat untuk mengupayakan berjalannya praktik kesejahteraan jangka panjang, selain itu juga sebagai sarana membangun konsolidasi ideologis politik Islam dalam mendukung misi partai. Dengan kata lain, politik filantropi dapat diartikan untuk orientasi sosial-kemanusiaan, sementara filantropi politik dapat diartikan untuk orientasi kekuasaan dalam dinamika politik elektoral (pemilu).

Keyword: Politik Kesejahteraan, Politik Filantropi, Modal Sosial, Demokrasi Sosial, Politik Ideologis Islam.

Latar Belakang

Kondisi perekonomian Indonesia sejak tahun 1997-1998 mengalami krisis moneter yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai tukar rupiah (inflasi). Dampak tersebut mengganggu kestabilan negara dalam beberapa sektor, baik politik, pendidikan, teknologi-sains, budaya, dan religi. Fenomena multidimensi tersebut mengundang perhatian masyarakat kelas menengah untuk melakukan pemberdayaan pembangunan ekonomi dan advokasi untuk perubahan sosial. Disinilah titik central hadirnya kepedulian sosial yang mengundang banyak masyarakat sipil (*civil society*) untuk memainkan peran konsolidasi politik humanis (kemanusiaan) saat kapasitas negara rendah. Dalam menyikapi situasi krisis 1998 tersebut, menggerakkan hati beberapa tokoh yaitu Bagus Suryama Majana Sastra (Kader PKS), Sahabudin, Agung Notowiguno, dan Dedi Sularso melakukan aksi sosial ke seluruh Indonesia, yang outputnya membangun yayasan kepedulian sosial yang terorganisir dengan visi kemanusiaan yaitu PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat). Dalam hal tersebut beberapa tokoh PKPU diluar lembaga menjadi kader muslim Partai Keadilan (saat ini PKS).

Selain PKPU dan beberapa lembaga filantropi lainnya baik berbasis negara maupun perusahaan, partai politik juga memiliki komitmen sosial dalam merespon masalah kemanusiaan contohnya seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan satu-satunya partai politik di Indonesia yang memiliki komitmen tinggi berkhidmat dalam masalah sosial-kemanusiaan. Maka secara tidak langsung dalam momentum permasalahan sosial yang sangat kompleks kesejahteraan menjadi barang politik (*political goods*) yang dikontestasikan oleh banyak pihak. Dalam permasalahan ini telah terjadi politik kesejahteraan yang merupakan alat dalam pertarungan proses elektoral menjadi modal sosial dan model kampanye kontemporer di Indonesia. Hadirnya kesejahteraan merupakan bagian dari tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi pembukaan UUD 1945 alenia ke empat. Politik kesejahteraan ini pada dasarnya juga berorientasi membentuk kepercayaan publik yang disudutkan dengan isu kemanusiaan yang urgent untuk mendapat perhatian dan penanganan cepat, tepat pada sasaran, salah satunya melalui gerakan lembaga filantropi yang fokus pada program kemanusiaan. Kesejahteraan merupakan isu global (*global issue*) yang menarik

untuk dimasukkan dalam parhelatan politik karena nantinya akan muncul inovasi program yang populis. Politik merupakan gelanggang dalam pertarungan kekuasaan untuk menduduki posisi strategis dalam proses pengambilan kebijakan. Partai politik sebagai subyek utama yang bermain untuk berdinamika sosial. Gerakan fundamental parpol harus bekerja eksis dalam menjaga citra agar tetap dikenal masyarakat luas salah satunya melalui *charity* atau aktivitas sosial (Latief, 2013). Kerja sosial tersebut dilakukan masif oleh lembaga filantropi nasional yaitu PKPU, meskipun secara historis merupakan lembaga filantropi terbesar di Indonesia yang lahir dari inisiasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal menarik 10 tahun terakhir yaitu adanya kontestasi penyelenggara kesejahteraan (*political goods*) yaitu antara masyarakat sipil dengan negara, masyarakat sipil dengan masyarakat sipil, masyarakat sipil dengan partai politik, partai politik dengan negara, partai politik dengan partai politik, masyarakat sipil dengan korporasi, negara dengan korporasi maupun masyarakat sipil dengan media. Hal ini mengilustrasikan banyak aktor yang terlibat dalam mengelola urusan filantropi dengan segala dampak positif dan efek negatifnya, terlebih hadirnya kepentingan politik dari proses penyedia kesejahteraan. Dalam hal ini juga muncul wacana politisasi kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh partai politik yang berafiliasi dengan lembaga filantropi baik lokal maupun nasional.

Maka berdasarkan data dan permasalahan yang hadir di era kontemporer penulis ingin mengetahui secara komprehensif terkait kontestasi politik kesejahteraan berbasis filantropi di Indonesia. Sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana kontestasi berjalan dan juga bagaimana pergeseran asimetris penyedia (aktor) kesejahteraan antara negara, masyarakat sipil dan partai politik berbasis filantropi. Kontribusi dalam penelitian ini adalah praktik-praktik kesejahteraan dianalisis dalam perspektif ilmu sosial dan ilmu politik. Hal ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya hanya menjelaskan pada tataran filantropi Islam (filantropi tradisional) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan modal usaha dalam waktu jangka pendek.

Metode Penelitian

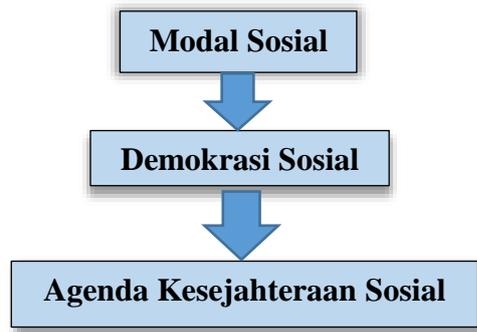
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif interpretatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Metode ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan informasi politik kesejahteraan berbasis filantropi yang terdapat pada Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dan ingin mengetahui patronase politik dibalik praktik pelayanan distribusi kesejahteraan.

Pembahasan

1. Cabang Gerakan Filantropi sebagai Praktik Politik Kesejahteraan

Latar historis sebagai lembaga yang dilahirkan atas inisiatif elit politik PKS, menyebabkan praktik kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh PKPU masih berada pada garis sejajar dengan arah ideologi parpol. Politik kesejahteraan yang dilakukan oleh PKS tidak mudah dikenali atau *soft politics* (politik halus) dari dimensi kekuasaan (politik elektoral). Namun, justru gerakan-gerakan filantropi dalam mewujudkan kesejahteraan yang dijalankan PKPU lebih menonjolkan politik dengan karakter kepedulian, *humanitarian*, *charity*, dan kedermawanan. Dalam hal ini dibuktikan oleh masifnya intensitas kerja PKPU berbasis *advocacy* (pemberdayaan) maupun *charity* (santunan) yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya peningkatan komitmen kerja.

Pada prinsipnya aktivitas filantropi sebagai praktik politik kesejahteraan memiliki cabang-cabang terkait yang saling mendukung arah gerakannya seperti bagan berikut:



Sumber: Diolah oleh Penulis (2018)

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa modal sosial adalah kemampuan yang dilakukan untuk mengurangi permasalahan sosial dengan beberapa metode seperti kedermawanan (*philantropy*), *giving*, *networking*, dan *voluntary*. Kekuatan modal sosial tersebut yang akan mendukung terwujudnya demokrasi sosial ditandai dengan adanya solidaritas sosial berbasis kerja-kerja sosial PKPU dalam distribusi kesejahteraan. Adapun subyek demokrasi sosial dilakukan masyarakat dan negara. Artinya disini lembaga filantropi berbasis masyarakat sipil dan negara sebagai penyedia pelayanan kesejahteraan. Sementara dengan berhasilnya demokrasi sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat sipil maupun negara akan mendukung agenda kesejahteraan sosial. Ketika kesejahteraan sosial berhasil dilakukan oleh masyarakat sipil (*civil society*) yang mengisi kekosongan negara maka disitulah berhasilnya politik *citizenship* atau politik *intermediary*.

Untuk menjelaskan variasi cabang gerakan politik filantropi, penulis telah membagi dua jenis filantropi diantaranya politik filantropi inklusi dan politik filantropi yang berkarakter ideologis.

1. Politik Filantropi Inklusi merupakan konsep lembaga filantropi yang dilakukan dengan sebuah metode pendekatan dan pengembangan secara terbuka. Dalam hal ini narasi yang ada dalam wawancara yang dilakukan oleh

peneliti menunjukkan lembaga filantropi PKPU sebagai lembaga yang inklusi, namun peneliti belum mendapat bukti empirik bahwa PKPU membantu di luar ideologi Islam.

2. Politik Filantropi Ideologis merupakan metode praktik kerja kemanusiaan berdasarkan persamaan ideologi. Seperti PKPU sebagai lembaga yang dilahirkan aktivis muslim dan sebelumnya pernah menjadi LAZ maka rasional ketika PKPU masih menerapkan ideologi Islam atau belum dapat menjadi lembaga filantropi terbuka (inklusi). Terbukti dengan beberapa sistem kemitraan berbasis lembaga atau komunitas Islam yang dijalankan.

Maka, ketika PKPU berjalan atas dasar ideologi disinilah terjadi politik ideologi Islam dengan misi dakwah. Ideologi tersebut untuk membangun kekuatan konsolidasi politik Islam, sehingga apabila semakin banyak masyarakat Islam yang bergabung dalam aktivitas ini, secara perlahan kelompok tersebut akan menyusun strategi politik dalam menekan kebijakan negara melalui seruan aksinya. Banyak masyarakat yang tidak menyadari aktivitas ini, namun ketika diamati secara mendalam arah gerakan yang dilakukan PKPU cenderung ideologis. Gerakan dakwah ini tidak menutup kemungkinan berupaya untuk melakukan Islamisasi masyarakat sekaligus Islamisasi negara karena, hubungan ideologis parpol masih melekat kuat dalam lembaga PKPU, dimana pasca reformasi seiring dengan melemahnya kapasitas negara aktivitas filantropi sebagai upaya mewujudkan agenda kesejahteraan PKS sebagai agensi parpol berada dalam gerakan tersebut.

2. Pengaruh *Background* Islam terhadap Konsolidasi Politik Filantropi

Identitas Islam memang memiliki pengaruh besar dalam branding lembaga filantropi jangka panjang. Hal lain karena munculnya PKPU juga mengadopsi filantropi Islam tradisional yang spesifik pada aspek zakat, infaq, wakaf dan shodaqah. Filantropi Islam bisa menjadi alat politik yang berubah menjadi zakat politik dalam distribusi sembako menjelang pemilu atau pada masa kampanye dengan alasan shadaqah para calon kandidat parpol yang diberikan kepada masyarakat miskin. Namun, sejalan dinamika filantropi tradisional yang hanya jangka pendek membuat adanya transformasi filantropi keadilan melahirkan program jangka panjang melalui aktivitas pemberdayaan masyarakat menuju perubahan sosial yang lebih luas. Selanjutnya mengajak beberapa lembaga khususnya perusahaan yang selalu melibatkan beberapa elemen masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab membantu permasalahan sosial sebagai wujud kepedulian dan komitmen perusahaan.

Dasar keislaman menjadi peluang besar dimanfaatkan dalam ranah politik praktis sebagai sarana konsolidasi aliansi politik Islam. Melalui mesin sosial partai PKS yang lahir dari amal nyata kader sebagai bentuk untuk merespon fenomena sosial, dalam hal ini PKPU dan Rumah Zakat memegang kendali penuh untuk turut serta membantu misi PKS dalam pendekatan kultural kepada masyarakat melalui aktivitas pemberdayaan sosial dan distribusi kesejahteraan yang tidak lain untuk membantu misi elektoral partai.

Konsep filantropi Islam yang berbasis masyarakat menjadi kajian unik di Indonesia, kajian ini erat juga hubungannya dengan masyarakat sipil Islam dalam perspektif teoritis terkenal dari sosok antropolog Robert W.

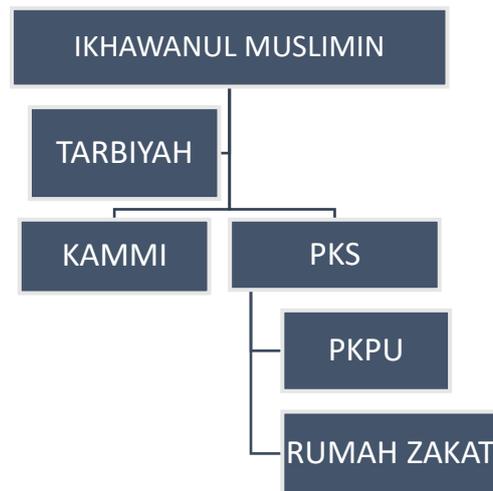
Hefner pada bukunya yang berjudul *Civil Islam* (2000). Amelia Fauzia (2016:8) masyarakat sipil muslim secara sederhana mengacu pada masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil yang memberlakukan nilai keislaman dalam beberapa konteks seperti insitusi Islam masjid, lembaga wakaf, kelompok tarekat. Salah satunya yaitu PKPU berbasis Islam sebagai lembaga yang sudah lama andil dan turut membantu bangsa Indonesia sejak pasca orde baru 1998 dimana terjadi banyak permasalahan sosial di Ambon, mereka mampu mengisi kekosongan negara dalam pelayanan kesejahteraan. Pada posisi ini masyarakat sipil Islam (PKPU) selalu menjadi aktor penengah (*intermediary*) dalam artian bebas dari pengaruh penguasa yang bertugas mengisi ruang kosong negara dalam kerja-kerja kemanusiaan untuk perubahan sosial bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Filantropi Sebagai Gerakan Oposisi (Perlawanan) Politik

Filantropi merupakan bagian aktivitas sosial masyarakat yang banyak dijalankan beberapa negara khususnya negara Islam (Saudi Arabia, Libya, Yaman, Malaysia, Pakistan, dan Sudan, Turki, dll). Dari ketujuh negara tersebut mewajibkan pelaksanaan satu atau beberapa bentuk zakat dalam ketentuan hukum negara mereka (Fauzia, 2016:12). Tak terkecuali Indonesia sebagai negara sekuler religius yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia juga memiliki kewajiban zakat atas perintah agama Islam bukan zakat atas perintah penguasa (negara). Aktivitas filantropi modern (keadilan sosial) notabennya yang lahir dari filantropi Islam tradisional (zakat, shadaqah, wakaf) memiliki kekuatan finansial yang sangat

berpengaruh dalam mendukung kekuatan pembangunan nasional khususnya bidang ekonomi, dan sosial sehingga hal ini mulai disadari pada rezim Soeharto ingin mengambil alih aktivitas filantropi khususnya zakat menjadi pajak untuk negara meskipun berakhir pada tahun 1970. Akhir dari aktivitas itu dikarenakan tidak adanya dukungan militan dari kalangan muslim reformis. Amelia Fauzia (2016:6) kepentingan memperbarui (mengakhiri pengumpulan zakat nasional) filantropi Islam sangat bersesuaian dengan kalangan Islamis, dimana kelompok ini memiliki agenda untuk mendirikan negara Islam yang akan terus-menerus mendorong proses Islamisasi di semua sektor kehidupan, maka tidak heran mendapat dukungan signifikan dari beberapa kelompok oportunis seperti kelompok Islamis, birokrat negara, dan partai politik. Sebenarnya yang harus diketahui adanya upaya memperbarui filantropi Islam di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan muslim reformis radikal seperti *Ikhwanul Muslimin (IM)*, dipimpin langsung oleh Hasan Al-Banna, berasal dari Turki sangat aktif melakukan gerakan sosial khususnya kedermawanan (filantropi) demi melicinkan misi politik untuk mengislamisasi masyarakat dan negara.

Gerakan politik filantropi dilahirkan dari hubungan kultural yang berada dalam lingkaran PKS sebenarnya dilahirkan dari gerakan Islam Timur Tengah. Adapun secara kultural dapat dilihat dalam analisa bagan di bawah ini:



Sumber: Diolah oleh Penulis (2018)

Ilustrasi di atas dapat di jelaskan hubungan hierarkis kultural yang sudah lama hadir di Indonesia dan jarang disadari oleh masyarakat yaitu Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan reformis atau Islam garis keras (radikal) yang berasal dari Turki didirikan oleh Hasan Al-Banna 1928. Amelia Fauzia (2016:13) gerakan ini menganggap negara dan masyarakat sebagai sebuah kesatuan sistemik dan Indonesia dalam kegiatan filantropi Islam Pasca Orde Baru menunjukkan adanya pengaruh dari gerakan kebangkitan ini. Realita di lapangan menunjukkan bukti otentik dimana tokoh politik Indonesia Helmi Aminuddin sebagai ketua Majelis Syuro PKS selaku pelopor awal penganut gerakan tersebut. Selain itu sosok intelektual Imaduddin Abdulrahim (Bang Imad), Rakhmat Abdullah dan Abdi Sumaiti (Abu Ridho) juga merupakan tokoh yang berhasil merancang lahirnya kelompok belajar informal yang saat ini disebut sebagai gerakan Tarbiyah (Bubalo, Fealy, Mason, 2012:49). Kelompok Tarbiyah merupakan sebuah gerakan Orde Baru yang berhasil menumpas rezim Soeharto dengan cara mengkonsolidasi gerakan dakwah Islam di kalangan mahasiswa Muslim.

Dalam gerakan ini kajian bukan hanya tentang Islam seperti *halaqah* (diskusi), *Liqah* (pertemuan) yang membahas teks Islam, *fiqih*, shalat, dan puasa bersama namun, juga melakukan aktivitas filantropi seperti penggalangan dana bantuan bencana dan komersial yang di ajarkan cara berwirausaha (*entrepreneurship*) melalui gerakan dakwah kampus, aktivitas ini berjalan sampai saat ini dan diadopsi oleh beberapa organisasi Islam lainnya. Ruang lingkup dengan iklim religius tersebut justru mendapat dukungan penuh dari Soeharto yang terbukti mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti Rohis dalam aktivitas studi Kampus (Bubalo, Fealy, Mason, 2012:52). Pemerintah kecolongan yang tidak mengetahui adanya misi terselubung dibalik aktivitas kelompok Tarbiyah yang dipandang menjalankan misi dakwah Islam dikalangan mahasiswa kampus mampu membangun gerakan konsolidasi yang ditandai lahirnya KAMMI sebagai pelopor utama reformasi dari kalangan aktivis Islam. Dalam waktu yang pendek KAMMI mampu mengakomodir mahasiswa untuk melakukan aksi protes yang menuntut turunnya Soeharto dan mampu melakukan kerjasama dengan kelompok mahasiswa lainnya dari organisasi kiri dan non muslim (Bubalo, Fealy, Mason, 2012:54).

4. Karakteristik Gerakan Filantropi Orde Baru dan Reformasi

Hadirnya PKPU sejak masa orde baru sampai dengan masa reformasi meninggalkan beberapa poin penting mengenai perjalanan sejarah kelahiran lembaga filantropi di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari karakteristik kinerja PKPU dari beberapa kurun waktu yang berbeda. Pada

masa orde baru gerakan yang dilakukan oleh PKPU melakukan ekspedisi nusantara dari daerah-daerah di Indonesia yang terkena dampak bencana alam dan bencana sosial, dalam aktivitas ini PKPU intensif dengan metode *charity dan fundrising* untuk membantu masyarakat menangani permasalahan kesejahteraan sosial. Sementara, pada masa reformasi, aktivitas filantropi yang dijalankan oleh PKPU cenderung jauh lebih luas dengan metode pemberdayaan dan advokasi masyarakat. Maka, untuk mengetahui perbedaan karakteristik PKPU dari masa orde baru sampai reformasi penulis membagi dalam bentuk berikut: **Table 1 perbedaan filantropi orde baru dan reformasi:**

| No | Masa orde baru | Reformasi |
|----|--|--|
| 1 | Belum adanya pelembagaan filantropi (di bawah kepemimpinan tradisional rezim Soeharto) | Adanya pelembagaan filantropi |
| 2 | Filantropi tradisional (zakat, infaq, shodaqah) | Transformasi filantropi modern (keadilan sosial) |
| 3 | Adanya dinamika antara negara dan agama | Kontestasi negara dan masyarakat sipil |
| 4 | Aktivitas sebatas <i>charity</i> | Filantropi untuk perubahan sosial |
| 5 | Awalnya hanya sebuah yayasan | Lembaga filantropi nasional |
| 6 | Non Demokratis | Demokratis |

Sumber: diolah oleh penulis (2018)

5. Marketing Politik Filantropi

Kemajuan teknologi membawa berbagai tantangan dalam segala bidang khususnya persaingan, baik dunia bisnis ekonomi maupun politik. Dalam dunia bisnis istilah marketing merupakan kunci utama akselerasi perkembangan bisnis yang akan menjamin hubungan antara klien dengan instansi bisnis guna mendukung pengembangan perusahaan. Sementara, dalam dunia politik tidak kalah pentingnya karena di era demokrasi kontemporer metode marketing politik didukung oleh

kemajuan teknologi digital yang memudahkan komunikasi dan publikasi untuk mencari kontituen. Berfungsi untuk membangun sebuah hubungan yang baik antara partai politik, politikus, konstituen, maupun masyarakat secara luas. Sejalan dengan ungkapan Firmanzah (2008:50) menjelaskan perspektif marketing politik artinya hubungan dalam politik harus memperhatikan cara agar partai politik yang bersangkutan dapat membangun interaksi yang intensif dan terus-menerus tidak hanya dengan para pendukungnya melainkan juga dengan masyarakat luas. Sama halnya dengan metode yang dilakukan oleh lembaga filantropi PKPU melakukan kegiatan marketing dalam ranah politik. Dikatakan demikian karena melalui aktivitas kemitraan yang dijalankan masih pada kiblat kubu partai PKS.

Gerakan akar bawah lebih menysasar pada basis keislaman diyakini mampu membantu misi dakwah lembaga PKPU untuk bermitra dengan banyak pihak khususnya lembaga keagamaan. Kerjasama lembaga PKPU dilakukan oleh bidang kemitraan yang bertugas sebagai tim marketing secara profesional. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Surahmadi (2018) selaku kepala bidang kemitraan PKPU DIY mengungkapkan posisi struktural PKPU yaitu lembaga PKPU memiliki struktur organisasi dari kepala cabang yang membawahi langsung bidang operasional, pendayagunaan, dan bidang kemitraan. Operasional terkait dengan keuangan, manajemen administrasi dan SDM. Sementara tim pendayagunaan fokus pada program dilapangan dalam hal pemberdayaan dan penyaluran donasi dari donator kepada kelompok sasaran. Sementara, bidang kemitraan berhubungan langsung dengan para donatur dan mencari mitra baik komunitas masyarakat maupun CSR.

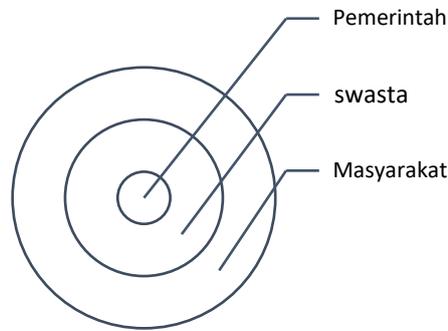
6. Filantropi Sebagai pilar Pembangunan Global

Praktik gerakan filantropi mulai dari aktivitas jangka pendek seperti aktivitas filantropi Islam (zakat, infaq, wakaf) sampai bertransformasi menjadi filantropi modern atau keadilan sosial menyimpan banyak manfaat yang sangat mempengaruhi proses pembangunan kesejahteraan nasional. Tradisi filantropi mampu menjadi pilar ketiga dalam pembangunan berkelanjutan. Pernyataan *The Organization of Economic Cooperation for Development* dalam Tamim (2016) menyatakan gagasan filantropi sebagai pilar pembangunan karena untuk menginisiasi pentingnya kontribusi perusahaan dalam mendukung program berkelanjutan sebagai upaya dalam merespon isu perubahan iklim dan pemanasan global. Upaya tersebut sebenarnya jika dicermati dalam kehidupan bermasyarakat sudah dipraktikkan dengan cara gotong royong, dan saling tolong menolong untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Praktik filantropi atau istilah umumnya kedermawanan saat ini menjadi suatu aktivitas sosial yang banyak dilakukan oleh beberapa orang baik bersifat individu maupun secara kolektif atau kelembagaan. Filantropi memberikan penekanan khusus dalam pembangunan kesejahteraan jangka panjang. Menurut *American Heritage Dictionary* dalam Tamim (2016), definisi filantropi mencakup tiga makna; 1) upaya peningkatan taraf hidup manusia, 2) rasa mencintai manusia secara universal dan 3) praktik dan aktivitas yang diarahkan untuk mempromosikan kesejahteraan manusia. Dalam hal pembangunan nasional akan dikaji lebih mendalam bagaimana praktik marketing kesejahteraan berbasis filantropi tersebut berjalan. Hal ini sangat dibuktikan oleh perjalanan panjang kiprah PKPU hadir ditengah-tengah krisis multidimensi yang berhasil mengisi ruang kosong negara.

Perjalanan PKPU awalnya hanya sebuah yayasan berkembang menjadi lembaga kesejahteraan berstandar internasional di bawah PBB, maka hal ini tentu akan memudahkan sinergitas agenda program dengan arah pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGS). Pada praktiknya metode kerja yang dilakukan oleh PKPU dibuat pembagian *teamwork* seperti tim kemitraan, tim pendayagunaan, dan tim operasional. Marketing dijalankan oleh bidang kemitraan untuk memudahkan pemasaran dan mencari mitra kerja lembaga.

Korelasi filantropi dan pembangunan tidak lepas karena adanya sumbangan besar dari anggaran filantropi. Menurut Robert Putnam dan James O Midgley dalam Tamim (2016) keduanya meletakkan faktor modal sosial sebagai pilar pembangunan. Midgley memetakan peranan ketiga aktor antara pemerintah, swasta dan, masyarakat harus bersinergi. Pemerintah berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sebagai lembaga negara yang harus memberikan jaminan kesejahteraan rakyat dengan kebijakan sosial yang humanis dan emansipatif, sementara swasta sebagai penyedia lowongan kerja dari aktivitas kerjanya, sehingga memberikan peluang pengurangan jumlah pengangguran. Sedangkan masyarakat sebagai aktor mandiri mempunyai modal sosial untuk pengentasan kemiskinan. Adapun model sosial yang dimaksud adalah hasil aktivitas filantropi (aksi kedermawanan) juga memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi baik skala lokal maupun nasional. Dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:



Sumber: Midgley dalam Tamim (2016)

Selain dari ketiga aspek tersebut yang menjadi pilar pembangunan penekanan utamanya yaitu bagaimana marketing dalam pelayanan jaminan kesejahteraan berjalan baik dari mulai penyedia layanan pendidikan, kesehatan, sampai aktivitas pemberdayaan sosial untuk peningkatan ekonomi mikro masyarakat. Aktivitas filantropi merupakan sebuah program yang inovatif ketika sudah terjalin sinergitas yang baik dalam agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN dan agenda pembangunan secara global melalui SDGs (*Sustainable Development Goals*). Pada prinsipnya agenda program pembangunan kesejahteraan yang dilakukan oleh PKPU cabang DIY secara tidak langsung selaras dengan agenda SGDs, hal ini bisa dilihat dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Memerangi angka kemiskinan yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada prosesnya PKPU sudah berupaya dengan beberapa cara yaitu optimalisasi potensi kearifan lokal seperti produksi makanan, dan kerajinan.
2. Memastikan pendidikan dan mendukung kesempatan belajar, PKPU cabang DIY khususnya sangat apresiatif dalam mendukung agenda program pendidikan yang dibuktikan dengan beasiswa pintar yang diserahkan kepada beberapa sekolah atau peserta didik langsung yang menjadi obyek sasaran.

3. Mencapai kesetaraan gender dalam hal ini PKPU cabang DIY sudah membuktikan dengan keberhasilan rumah Srikandi yang berubah nama menjadi Bunda Mengajar di Kota Yogyakarta, dalam program ini kontribusi peranan perempuan sangat bagus untuk membantu percontohan agenda pembangunan kesejahteraan sosial berbasis gender.
4. Memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi semua, hal ini telah menjadi program pembangunan PKPU di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo dengan mengadakan pembangunan sumur bor untuk mendapatkan air bersih. Selain itu ada program sanitasi dengan program rekor muri seribu jamban.
5. Mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka salah satunya melalui cara optimalisasi kearifan lokal baik kerajinan dengan metode pendampingan sehingga masyarakat dapat melanjutkan usaha mikro home industri.
6. Memastikan hidup sehat dan kesejahteraan sosial maka dalam hal ini PKPU melalui program pemberdayaan maupun *charity* yang sifatnya hanya jangka pendek telah mengupayakan jaminan kesejahteraan sosial.

Kesimpulan

Kehadiran PKPU sebagai fenomena pasca reformasi disebabkan oleh banyaknya persoalan sosial, politik, ekonomi khususnya adanya krisis moneter, dan krisis kesejahteraan. Kemudian fenomena tersebut ditanggapi oleh partai politik Islam yaitu PK (saat ini menjadi PKS) sebagai salah satu partai di Indonesia yang sangat serius dan konsisten mempunyai kesadaran aktivitas filantropi

(kederewanan) sebagai praktik ideologisasi kesejahteraan dalam tubuh organisasi politik. Maka dalam hal ini pembangunan gerakan politik filantropi yang lahir dari tubuh partai Islam (PKS) yaitu hadirnya PKPU mempunyai tiga makna: *pertama* munculnya lembaga filantropi pasca reformasi mampu menjadi alternatif penyedia kesejahteraan atau setidaknya telah mengupayakan respon terhadap persoalan sosial seperti kemiskinan, tanggap bencana, dan lainnya mengingat kesejahteraan merupakan barang politik (*political goods*) yang dikontestasikan oleh beberapa lembaga. *Kedua*, sebagai media perlawanan secara halus (*soft politics*) di saat negara mengalami *incapacity* atau *lack of governability* lembaga filantropi akan cenderung secara cepat mengisi ruang kosong yang belum disediakan oleh negara, *ketiga*, sebagai kekuatan politik Islam yang berkelindan dengan kepentingan elektoral, walaupun demikian riset ini belum mampu membuktikan secara faktual akan adanya dampak keberadaan PKPU bagi keberhasilan kompetisi elektoral (pemilu).

Selanjutnya, munculnya banyak lembaga penyedia pelayanan kesejahteraan sosial menyebabkan terjadinya politik kesejahteraan yang dibangun dengan kekuatan modal sosial dan secara teoritis dibangun dalam kepercayaan terhadap demokrasi sosial. Seperti halnya masyarakat Islam secara prinsip dan teologis sangat dekat dengan nilai-nilai demokrasi sosial melalui aktivitas sosialnya sehingga dikenal dengan terminologi sosialisme Islam. Maka dalam contohnya kehadiran PKPU dapat dianggap sebagai agensi kolektif non negara yang terlembagakan dengan baik untuk mengupayakan agenda kesejahteraan. Selain itu juga sebagai sarana membangun konsolidasi ideologis Islam. Aktivitas filantropi menjadi isu populis yang sangat dinanti masyarakat dengan inovasi program yang

humanis dan egaliter, sehingga praktik filantropi akan selalu dapat diterima secara langsung oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa tekanan adanya intervensi politik. Praktik kerja PKPU memberikan bukti nyata bahwa kekuatan masyarakat sipil mampu mengisi kekosongan negara dalam pelayanan jaminan kesejahteraan sosial.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zaenal. (2016). Paradoks dan Sinergi, Keberlanjutan, Ketuntasan (SINJUTAS) dan gerakan filantropi di Indonesia : *Share Social Work Journal : Volume.6 Nomor.2 ha: 154-272 ISSN:2339 0042p dan ISSN: 25281577e*
- Alwasilah, A.Chaedar. 2000. *Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Kualitatif*. Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya
- Aziz, Abdul. (2014). Manajemen Zakat Pada Lembaga Kemanusiaan PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) dalam meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Azca, Muhammad, Najib. Salim, Hairus. Arrobi, Moh Zaki. Asyari, Budi. Usman, Ali. 2019. *Dua Menyemai Damai (Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi)*. Yogyakarta: Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada.
- Bamualim, Chadider S. dan Abubakar Irfan. 2005. *Revitalisasi Filantropi Islam*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Bubalo, Anthony. Fealy, Greg. Mason, Whit. 2012. *PKS dan Kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir, dan Turki*: Depok. Lowy Institute for International Policy dan Komunitas Bambu.
- CSIS (*Centre For Strategic and International Studies*) yang ditulis oleh M. Djadjiono (2008:208-209)
- Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PEBS FE UI). (2009). *Indonesia Zakat and Development Report*.
- Fauzia, Amelia. 2016. *Filantropi Islam (sejarah dan kontestasi masyarakat sipil dan negara di Indonesia)*. Yogyakarta: Gading Publisng.
- Firmanzah. (2012). *Marketing Politik antara Pemahaman dan Realitas*: Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hadi, Alimul. (2014). Penerapan PROSPEK (Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Komunitas) Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Kelompok Amanah Kecamatan Medan Amplas. *Jurnal Universitas Sumatra Utara (USU)*
- Hidayat, Rachmat. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Jurnal Studi Agama ISSN: 2527-922X (p); 1412-0992 (e)Vol. XVII, no. 1 (2017), pp. 63-84, DOI: 10.20885/millah.vol17.iss1.art4*
- Hidayati, Okta Nurul.(2017).Filantropi Dakwah dan Kaum Minoritas di Indonesia. *Jurnal IAIN Surakarta Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2017 ISSN: 2579-9703 (P) / ISSN: 2579-9711*.

- Jahar, Asep Saepudin. (2016) Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam. *Jurnal Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1, Juni 2016* (hlm. 71-93) IAIN STS Jambi.
- Kholis, Nur: Sobaya, Soya: Andriansyah, Yuli, Iqbal, Muhammad. (2013). Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam: Vol VII No.1 Juli 2013*.
- Kuntowijoyo. (2018). *Identitas politik Umat Islam*: Yogyakarta. Mata Bangsa
- Latief, Hilman. 2017. *Melayani Umat (Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Latief, Hilman. 2013. *Politik Filantropi Islam di Indonesia*: Yogyakarta: Ombak
- L. Hassan, Sahar. Sukardiyono, Kuart. M.H, Basri, Dadi. 1998. *Memilih Partai Islam (Visi, Misi, dan Persepsi)*: Jakarta. Gema Insani Press.
- Mas'udi, Wawan. Lay, Cornelis. 2018. *Politik Kesejahteraan Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan PolGov Fisipol UGM dan Universitas Oslo, Norwegia.
- Mahmudya. Rizkha, Yuniar (2017). *Program pemberdayaan usaha mikro untuk membangun ekonomi masyarakat Kota Semarang*. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo Semarang (<http://eprints.walisongo.ac.id/7048/>)
- Payton, Robert L. and Moody, Michael P. 2008. *Understanding Philanthropy It's Meaning And Mission*, (USA: Indiana University Press), hlm. 27
- Rachman, Aulia. (2016). Pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif studi kasus program *Social Micro Finance* oleh lembaga amil zakat Muhammadiyah di Kabupaten Sleman. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Rumsya, Fesalia. (2018). Upaya Lembaga PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Dalam Pemberdayaan Wanita Di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Bandar Lampung. *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*.
- Sjahrir. 1998. *Krisis ekonomi menuju reformasi total*: Jakarta. Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Padi dan Kapas
- Salim, Agus. 2006. *Teori Paradigma dan Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sunderlin, Resosudarmo, Rianto dan Angelsen. (2000). Dampak Krisis Ekonomi Indonesia terhadap Petani Kecil dan Tutupan Hutan Alam di Luar Jawa. *Paper Center For International Forestry Research ISSN 0854-9818 June 2000*
- Tebba, Sudirman. 1993. *Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan*: Yogyakarta. PT. Tiara Wacana Yogya
- Wibowo, Waskito. (2018). Filantropi berbasis Masjid untuk Keluarga Narapidana Terorisme studi kasus di Kabupaten Lamongan. *Laporan Penelitian Maarif Fellowship 2017-2018 Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- W. Creswell, John. 2013. *Research Design (pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- W. Hefner, Robert. (2000). *Civil Islam (Islam dan Demokratisasi di Indonesia)*: Yogyakarta. ISAI dan The Asia Foundation.
- Qodir, Zuly. 2013. *HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik di Indonesia*: Yogyakarta. JKSG (Jusuf Kalla School of Government) dan Pustaka Pelajar.

Yunus. Mawardi.Yoesoef. (2018). Perkembangan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Aceh (2004-2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah Vol. 3 No. 3 – Juli 2018 (hal. 77 – 84)*

Tamim, Imron Hadi. 2016. Filantropi dan Pembangunan. *Jurnal Community Development Volume1 - journal.stainkudus.ac.id*

Sumber Internet dan lainnya:

<http://kliping.pkpu.or.id/?p=85> diakses pada 22 September 2018 pukul 09.00 wib

<http://baznas.go.id/profil> diakses pada 30 September 2018, pukul 15.00 wib

<http://pks.id/content/pks-tambah-jumlah-posko-bantuan-gempa-lombok> di akses pada pukul 15.00 10 November 2018

<http://www.humanitarianforumindonesia.org> diakses pada pukul 09.00 WIB 10 Oktober 2018

<https://pkpu.org/> diakses pada 15 Oktober 2018, pukul 19.45 WIB

Wawancara dengan beberapa informan yang dilakukan sejak Bulan Oktober 2018 sampai Januari 2019